

---

## ANALISIS FAKTOR SOSIAL-EKONOMI (PENDIDIKAN & PERTUMBUHAN EKONOMI) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI WILAYAH PERDESAAN JAWA TENGAH

Ulfia Natasa Maharani Putri<sup>1</sup>, Lia Ardiningrum<sup>2</sup>, Himmatul Ulya<sup>3</sup>, Muhammad Naufal Rizqullah<sup>4</sup>, Nina Farliana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: [ulfianatasamp@students.unnes.ac.id](mailto:ulfianatasamp@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [liardiningrum21@students.unnes.ac.id](mailto:liardiningrum21@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ulyahimmatul741@students.unnes.ac.id](mailto:ulyahimmatul741@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [naufalrzqy9@students.unnes.ac.id](mailto:naufalrzqy9@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ninafarliana@mail.unnes.ac.id](mailto:ninafarliana@mail.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di wilayah perdesaan Jawa Tengah, khususnya di sepuluh kabupaten yang menjadi fokus studi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka dan wawancara semi-terstruktur terhadap 21 responden usia produktif yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penganggur di desa didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebesar 62,5%, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara peningkatan pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja lokal. Faktor utama penyebab pengangguran meliputi terbatasnya usaha yang membuka lowongan pekerjaan, sifat pekerjaan desa yang mayoritas musiman (sektor pertanian), serta tingginya kontribusi putus sekolah terhadap angka pengangguran. Selain itu, ditemukan hambatan sosial berupa praktik nepotisme dan kurangnya akses informasi yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangguran di desa bersifat multidimensional dan memerlukan strategi terintegrasi yang mencakup pengembangan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.

**Kata Kunci:** Pengangguran, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Wilayah Perdesaan, Jawa Tengah.

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of education levels and economic growth on unemployment rates in rural areas of Central Java, specifically focusing on ten regencies. The research employs a qualitative descriptive method, collecting data through open questionnaires and semi-structured interviews with 21 productive-age respondents selected via purposive sampling. The results indicate that the majority of unemployed individuals are high school/vocational school (SMA/SMK) graduates (62.5%), suggesting a mismatch between educational improvements and local job availability. The primary factors contributing to unemployment include the limited number of businesses offering job opportunities, the*

*seasonal nature of rural work (predominantly agriculture), and the significant contribution of school dropouts to unemployment rates. Furthermore, social barriers such as nepotism and lack of information access were found to exacerbate labor conditions. The study concludes that rural unemployment is multidimensional, requiring integrated strategies that include local economic development, the creation of productive jobs, and skills training relevant to the labor market.*

**Keywords:** *Unemployment, Education, Economic Growth, Rural Area, Central Java.*

## PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu persoalan sosial-ekonomi yang paling krusial di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keberlanjutan pembangunan. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan pengangguran tidak hanya menjadi isu di wilayah perkotaan, tetapi juga semakin menonjol di wilayah perdesaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desa tidak lagi menjadi ruang yang sepenuhnya mampu menyediakan pekerjaan bagi penduduk usia produktifnya.

Di Provinsi Jawa Tengah, persoalan pengangguran di wilayah perdesaan masih menjadi tantangan besar, khususnya di kabupaten Pemalang, Brebes, Cilacap, Blora, Grobogan, Kebumen, Purbalingga, Wonogiri, Sragen, dan Rembang. Daerah-daerah tersebut memiliki jumlah desa yang besar dan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, seperti pertanian dan perdagangan kecil. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan tingkat pendidikan masyarakat desa, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja. Akibatnya, banyak penduduk desa yang menganggur atau terpaksa bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan upah yang rendah.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan ekonomi daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak.

Secara teoritis, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja (Todaro & Smith, 2020). Dengan pendidikan yang lebih tinggi, individu diharapkan memiliki peluang kerja yang lebih besar dan risiko menganggur yang lebih kecil. Namun, di wilayah perdesaan Jawa Tengah, khususnya pada daerah penelitian, peningkatan pendidikan justru belum sepenuhnya menurunkan tingkat pengangguran. Banyak lulusan SMA/SMK di desa menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini menunjukkan adanya mismatch antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, serta lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan sektor ekonomi desa.

Selain pendidikan, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang menentukan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui peningkatan produksi, investasi, dan aktivitas usaha. Akan tetapi, di sebagian besar wilayah perdesaan Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat lambat dan tidak merata. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor berproduktivitas rendah membuat penciptaan lapangan kerja baru berjalan terbatas. Kondisi ini menyebabkan angkatan kerja yang terus bertambah tidak dapat diserap secara optimal,

sehingga angka pengangguran tetap tinggi meskipun terdapat peningkatan pendidikan.

Berdasarkan realitas tersebut, judul “Analisis Faktor Sosial-Ekonomi (Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Perdesaan Jawa Tengah” dipilih karena mampu merepresentasikan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat desa, khususnya di kabupaten Pemasang, Brebes, Cilacap, Blora, Grobogan, Kebumen, Purbalingga, Wonogiri, Sragen, dan Rembang. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dipilih sebagai variabel utama karena keduanya merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah, yang secara teoritis memiliki hubungan erat dengan tingkat pengangguran.

Penelitian ini penting dilakukan karena pengangguran di wilayah perdesaan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, urbanisasi, dan meningkatnya ketimpangan antarwilayah. Banyak penduduk usia produktif dari desa memilih merantau ke kota atau ke luar negeri sebagai alternatif mencari pekerjaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka desa akan kehilangan tenaga kerja produktif yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Wahyulianti et al (2025) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Jawa Tengah. Penelitian lain oleh Wahab (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan jumlah pengangguran. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan data agregat provinsi atau nasional dan belum secara khusus memfokuskan pada wilayah

perdesaan serta kabupaten tertentu. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji pengaruh pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan dalam konteks desa. Inilah yang menjadi gap penelitian dalam studi ini.

Penelitian ini menawarkan solusi konseptual dengan menganalisis secara bersamaan pengaruh pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di wilayah perdesaan Jawa Tengah. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja desa serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di wilayah perdesaan Jawa Tengah, khususnya di kabupaten Pemasang, Brebes, Cilacap, Blora, Grobogan, Kebumen, Purbalingga, Wonogiri, Sragen, dan Rembang, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pengangguran di desa.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam kajian ketenagakerjaan di wilayah perdesaan. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselarasan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata, narasi, dan makna yang diperoleh dari subjek penelitian, sehingga tidak berfokus pada angka-angka statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pengaruh faktor sosial-ekonomi, khususnya tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, terhadap tingkat pengangguran di wilayah perdesaan Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pemalang, Brebes, Cilacap, Blora, Grobogan, Kebumen, Purbalingga, Wonogiri, Sragen, dan Rembang.

Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data, dan (3) penyajian hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terbuka dan wawancara semi-terstruktur yang diberikan kepada masyarakat usia produktif yang berdomisili di wilayah perdesaan Jawa Tengah. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, berada pada usia produktif, dan memiliki pengalaman bekerja maupun menganggur.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 21 orang yang terdiri dari 16 melalui kuesioner dan 5 melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Menurut Boyatzis (dalam Braun & Clarke, 2006), analisis tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta melaporkan pola atau tema yang muncul dari data, sehingga dapat menggambarkan makna sosial yang terkandung dalam pengalaman

responden terkait pengangguran di wilayah perdesaan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber guna meningkatkan kredibilitas temuan. Peneliti melakukan pengecekan silang antara hasil kuesioner dan wawancara agar data yang diperoleh tetap akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini berfokus pada analisis pengalaman dan persepsi masyarakat perdesaan Jawa Tengah terhadap keterkaitan antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi ketenagakerjaan di wilayah perdesaan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan dan menganalisis data primer yang berhasil dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 16 responden dan 5 responden wawancara yang dipilih secara acak. Sesuai dengan metodologi yang telah diuraikan sebelumnya, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tematik. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menggambarkan karakteristik responden serta menjelaskan pola-pola utama yang berkaitan dengan pengangguran di wilayah perdesaan, khususnya ditinjau dari aspek demografis dan spasial. Temuan-temuan ini selanjutnya dibahas dan dikaitkan dengan teori serta hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena pengangguran di desa. Penyajian hasil disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari data.

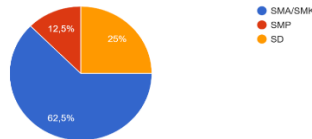
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, diketahui bahwa karakteristik usia responden didominasi oleh kelompok usia produktif awal, yaitu rentang 19–21 tahun. Kelompok usia 19 tahun merupakan proporsi terbesar dengan 37,5%, disusul usia 20 tahun sebesar 25%, sementara sisanya tersebar pada usia 18 dan 21 tahun. Dominasi kelompok usia muda ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di wilayah perdesaan tidak hanya dialami oleh kelompok usia lanjut, tetapi juga telah menjadi masalah serius bagi generasi muda yang seharusnya berada pada fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja muda dengan kesempatan kerja yang tersedia di desa, sehingga usia produktif tidak secara otomatis menjamin terserapnya tenaga kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi perdesaan belum mampu mengakomodasi lonjakan angkatan kerja muda yang terus bertambah setiap tahun.

Dari sisi wilayah domisili, responden berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Brebes (20%), Kebumen (20%), Pemalang (13,3%), Blora (13,3%), Grobogan (13,3%), Purbalingga (13,3%), dan Wonogiri (6,7%). Persebaran responden yang relatif merata ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di desa bukan merupakan fenomena yang bersifat lokal, melainkan mencerminkan masalah lintas wilayah yang bersumber dari kondisi struktural ekonomi perdesaan. Kesamaan karakteristik permasalahan di berbagai kabupaten tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran di perdesaan bersifat sistemik, dipengaruhi oleh keterbatasan sektor non-pertanian, rendahnya daya serap lapangan kerja, serta belum berkembangnya sektor produktif alternatif. Secara tematik, temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengangguran di desa memiliki dimensi demografis dan spasial yang saling berkaitan.

Dominasi responden usia muda yang tersebar di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa tantangan pengangguran di desa tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya daya serap ekonomi desa terhadap angkatan kerja produktif. Kondisi ini sejalan dengan teori ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2020), yang menyatakan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi yang sempit dan bergantung pada sektor primer cenderung mengalami surplus tenaga kerja. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Wahab (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Dalam konteks penelitian ini, dominasi usia produktif awal menunjukkan adanya tekanan demografis terhadap pasar kerja desa yang belum siap menyerap tenaga kerja muda secara optimal.

Selain itu, hasil ini juga mendukung penelitian Wahyulianti et al (2025) yang menemukan bahwa kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pengangguran, terutama di wilayah dengan keterbatasan sektor industri dan jasa. Hal ini menegaskan bahwa persoalan pengangguran di desa tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan proses transisi pendidikan ke dunia kerja yang belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengangguran di wilayah perdesaan Jawa Tengah merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor demografis, spasial, dan struktural ekonomi. Oleh karena itu, penanganan pengangguran perdesaan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, lintas wilayah, serta berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda desa.

**Diagram 3.1 Tingkat Pendidikan Mayoritas Penganggur di Desa**



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Bagian ini mengawali pembahasan dengan memaparkan karakteristik pendidikan responden yang tergolong sebagai penganggur di wilayah perdesaan. Informasi mengenai tingkat pendidikan penting untuk memahami bagaimana latar belakang sumber daya manusia berpengaruh terhadap peluang kerja dan risiko pengangguran di desa. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja. Namun, dalam konteks pedesaan, hubungan antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu berjalan secara linear. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan bahwa tingkat pendidikan penganggur di desa didominasi oleh lulusan SMA/SMK, yaitu sebesar 62,5%. Selanjutnya, lulusan SD sebesar 25%, dan lulusan SMP sebesar 12,5%. Distribusi ini menunjukkan bahwa pengangguran di desa tidak hanya dialami oleh masyarakat berpendidikan rendah, tetapi justru cukup tinggi pada kelompok dengan pendidikan menengah. Dominasi lulusan SMA/SMK menjadi indikasi bahwa peningkatan tingkat pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan.

Secara teoritis, pendidikan berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja berpendidikan dan permintaan lapangan kerja lokal. Kondisi

ini sejalan dengan konsep skill mismatch, yaitu ketika keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Desa pada umumnya belum memiliki sektor industri, jasa modern, maupun lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap lulusan SMA/SMK secara optimal. Di sisi lain, lulusan pendidikan menengah cenderung memiliki ekspektasi terhadap pekerjaan yang lebih stabil dan layak dibandingkan pekerjaan tradisional seperti buruh tani atau pekerja serabutan. Ketika pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun harapan mereka, maka individu tersebut berpotensi memilih untuk menunda bekerja atau menunggu kesempatan kerja lain. Fenomena ini dikenal sebagai pengangguran terdidik.

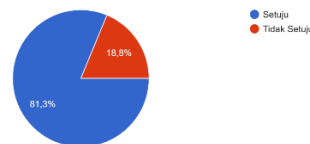
Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyulianti et al (2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menengah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sektor ekonomi non-pertanian. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wahab (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja akan memperbesar risiko pengangguran, termasuk pada kelompok berpendidikan menengah. Dari sudut pandang teori pembangunan, kondisi ini juga sesuai dengan pemikiran Todaro & Smith (2020) yang menjelaskan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi yang sempit dan bergantung pada sektor primer cenderung mengalami surplus tenaga kerja terdidik. Pendidikan yang meningkat tidak otomatis menciptakan pekerjaan jika tidak diikuti dengan diversifikasi sektor ekonomi.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran di desa tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga harus diarahkan pada transformasi struktur ekonomi desa. Diversifikasi

ekonomi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan desa pada sektor pertanian tradisional yang bersifat musiman dan memiliki daya serap tenaga kerja terbatas. Pengembangan sektor non-pertanian seperti industri rumah tangga, ekonomi kreatif, pariwisata desa, serta jasa berbasis potensi lokal dapat membuka peluang kerja yang lebih beragam dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi desa merupakan strategi yang relevan dalam memperluas kesempatan kerja. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan pendidikan menengah. Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jaringan pemasaran menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing usaha desa.

Di sisi lain, penciptaan sektor produktif yang selaras dengan kebutuhan pasar perlu didukung oleh sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha. Pendidikan menengah, khususnya SMA/SMK, perlu diarahkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja lokal melalui penguatan keterampilan praktis, pelatihan berbasis potensi desa, serta program magang atau kemitraan dengan unit usaha setempat. Strategi penanggulangan pengangguran di desa harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa transformasi struktur ekonomi yang lebih adaptif dan produktif, peningkatan pendidikan semata tidak akan cukup untuk menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan basis ekonomi lokal agar desa mampu menjadi ruang yang produktif bagi generasi muda.

**Diagram 3.2 Pekerjaan di Desa Bersifat Musiman**



*Sumber : Data Primer Diolah, 2026*

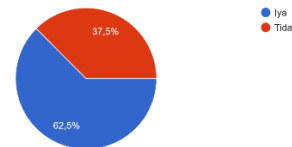
Setelah mengkaji karakteristik demografis responden, bagian ini membahas salah satu faktor struktural utama yang memengaruhi tingginya pengangguran di wilayah perdesaan, yaitu sifat pekerjaan yang musiman. Variabel ini diukur untuk mengetahui sejauh mana responden memandang bahwa keterbatasan kesempatan kerja di desa disebabkan oleh ketergantungan terhadap sektor-sektor yang hanya aktif pada periode tertentu, khususnya pertanian. Hasil survei menunjukkan bahwa 81,3% responden menyatakan setuju bahwa sebagian besar pekerjaan di desa bersifat musiman (misalnya saat musim tanam dan panen), sementara 18,8% responden tidak setuju. Tingginya tingkat persetujuan ini mengindikasikan bahwa pola aktivitas ekonomi desa masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama pertanian, yang memiliki siklus produksi tidak berlangsung sepanjang tahun. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap sektor pertanian menyebabkan fluktuasi permintaan tenaga kerja yang tajam. Pada masa tanam dan panen, kebutuhan tenaga kerja meningkat, namun setelah periode tersebut berakhir, aktivitas ekonomi cenderung menurun drastis. Akibatnya, sebagian masyarakat desa mengalami pengangguran periodik, yaitu kondisi menganggur pada waktu-waktu tertentu dalam setahun.

Kondisi ini selaras dengan konsep pengangguran musiman (seasonal unemployment) dalam teori ekonomi tenaga kerja, yang terjadi akibat perubahan musim dan siklus produksi (Borjas & Cassidy, 2021). Dalam konteks perdesaan Indonesia,

fenomena ini diperkuat oleh minimnya sektor alternatif non-pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. Penelitian Suryahadi et al (2020) menunjukkan bahwa desa-desa yang bergantung pada sektor pertanian cenderung memiliki tingkat kerentanan ekonomi lebih tinggi karena pendapatan rumah tangga sangat fluktuatif mengikuti musim. Temuan serupa juga disampaikan oleh BPS (2023) yang mencatat bahwa sebagian besar penduduk miskin dan setengah menganggur di Indonesia terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan struktur ekonomi berbasis pertanian. Selain itu, Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa ketergantungan pada sektor primer tanpa diversifikasi ekonomi akan memperkuat perangkap pengangguran dan kemiskinan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong migrasi tenaga kerja usia produktif ke kota, sebagaimana dijelaskan dalam teori migrasi desa-kota, di mana individu berpindah karena ketidakpastian pendapatan di desa dan peluang kerja yang lebih stabil di wilayah perkotaan.

Secara tematik, temuan ini memperkuat asumsi bahwa pengangguran di desa bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan masalah struktural yang berakar pada lemahnya basis ekonomi non-pertanian. Ketika desa tidak memiliki sektor ekonomi alternatif seperti UMKM, industri rumah tangga, atau jasa, maka masyarakat akan terus berada dalam siklus kerja tidak tetap. Oleh karena itu, penanganan pengangguran musiman di desa memerlukan strategi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan usaha non-pertanian, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi ruang produksi musiman, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Diagram 3.3 Mayoritas Penganggur Berpendidikan di Bawah SMA**



*Sumber : Data Primer Diolah, 2026*

Setelah mengidentifikasi faktor struktural seperti keterbatasan lapangan kerja dan sifat pekerjaan yang musiman, bagian ini membahas peran tingkat pendidikan sebagai determinan penting pengangguran di wilayah perdesaan. Pendidikan merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan kemampuan individu untuk memasuki dan bertahan di pasar kerja. Dalam konteks desa, rendahnya tingkat pendidikan sering kali memperbesar kerentanan terhadap pengangguran karena terbatasnya keterampilan, informasi, dan mobilitas kerja. Dalam teori modal manusia (human capital theory), pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan peluang kerja seseorang (Becker, 1993; diperkuat oleh Mankiw, 2021). Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan formal dengan pendapatan lebih stabil. Sebaliknya, pendidikan rendah cenderung berkorelasi dengan pekerjaan informal, upah rendah, dan risiko menganggur yang lebih besar. Suryahadi et al (2020) menemukan bahwa pengangguran di wilayah perdesaan Indonesia lebih banyak dialami oleh kelompok berpendidikan rendah, terutama lulusan SD dan SMP. Hal serupa dilaporkan oleh BPS (2023) yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perdesaan lebih tinggi pada kelompok dengan pendidikan di bawah SMA dibandingkan dengan lulusan pendidikan tinggi. Selain itu, Rahmawati et al (2025) menegaskan bahwa rendahnya pendidikan membatasi akses terhadap pekerjaan non-

pertanian yang lebih produktif, sehingga memperbesar risiko pengangguran struktural di desa.

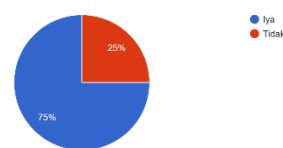
Berdasarkan hasil kuesioner, 62,5% responden menjawab “iya” bahwa mayoritas penganggur di desa berasal dari kelompok berpendidikan di bawah SMA, sedangkan 37,5% responden menjawab “tidak”. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih kuat bahwa pengangguran didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan rendah. Dominasi pandangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa menyadari adanya hubungan erat antara rendahnya pendidikan dengan terbatasnya kesempatan kerja. Individu yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD atau SMP umumnya tidak memiliki keterampilan teknis maupun administratif yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Selain itu, mereka juga cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi lowongan kerja, teknologi digital, serta pelatihan keterampilan. Namun, proporsi responden yang menjawab “tidak” (37,5%) juga cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di desa tidak lagi hanya dialami oleh kelompok berpendidikan rendah, tetapi juga semakin banyak dialami oleh lulusan SMA/SMK. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sari et al (2022) yang menyebutkan bahwa lulusan menengah di pedesaan menghadapi mismatch antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja lokal.

Dengan kata lain, pengangguran desa bersifat multidimensional. Di satu sisi, pendidikan rendah memang meningkatkan risiko pengangguran. Namun, di sisi lain, meningkatnya pengangguran lulusan SMA/SMK mencerminkan ketidaksiapan struktur ekonomi desa dalam menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Desa belum memiliki cukup sektor industri, jasa, maupun usaha produktif yang mampu menampung angkatan kerja terdidik. Kondisi ini juga sejalan dengan

penelitian Utami & Udjiyanto (2023) yang menunjukkan bahwa daerah pedesaan dengan struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi cenderung mengalami pengangguran terdidik, karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pengangguran desa bukan hanya persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mencerminkan keterbatasan daya serap ekonomi desa. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan pengangguran tidak cukup hanya melalui peningkatan pendidikan formal, tetapi juga harus disertai dengan: Pengembangan sektor ekonomi non-pertanian, Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar lokal, dan

Penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat desa. Dengan begitu, pendidikan dan struktur ekonomi desa harus berkembang secara seimbang agar peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak justru berujung pada peningkatan pengangguran terdidik.

**Diagram 3. 4 Rendahnya Pendidikan sebagai Faktor Utama Pengangguran**



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah membahas karakteristik pekerjaan desa yang cenderung bersifat musiman serta ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan struktur ekonomi desa, bagian ini secara lebih mendalam mengkaji persepsi masyarakat terhadap rendahnya tingkat pendidikan sebagai faktor utama penyebab pengangguran. Pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia karena sangat menentukan kemampuan individu dalam

memasuki dan bertahan di pasar kerja. Dalam konteks perdesaan, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai serta minimnya pelatihan keterampilan menyebabkan banyak penduduk tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar risiko pengangguran, khususnya bagi kelompok usia produktif. Dalam kerangka teori modal manusia (human capital), pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan peluang kerja seseorang (Mankiw, 2021). Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih luas, penghasilan yang lebih stabil, serta risiko pengangguran yang lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang memiliki pendidikan rendah sering kali terjebak pada pekerjaan berupah rendah, sektor informal, atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Kondisi ini juga tercermin dalam berbagai temuan empiris. BPS (2023) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di wilayah perdesaan masih didominasi oleh kelompok berpendidikan SD dan SMP. Selain itu, Wahyuni & Hidayat (2021) menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan secara signifikan meningkatkan kemungkinan individu bekerja di sektor informal atau menganggur di wilayah perdesaan Jawa Tengah. Setyowati & Melati (2020) menyimpulkan bahwa keterbatasan keterampilan akibat pendidikan rendah menjadi penghambat utama dalam mengakses pekerjaan formal di desa. Sementara itu, Zuhaida (2025) juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap peluang kerja, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih terbatas.

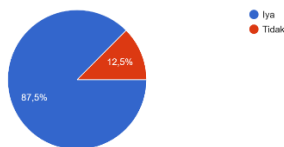
Berdasarkan hasil survei, 75% responden menjawab “iya” bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor utama penyebab pengangguran di desa, sementara 25% responden menjawab “tidak”. Dominasi

jawaban “iya” ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pendidikan sebagai modal dasar untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Responden menilai bahwa individu dengan pendidikan rendah umumnya memiliki keterampilan terbatas dan hanya dapat bekerja di sektor informal seperti buruh tani, buruh bangunan, atau pekerja serabutan. Sektor-sektor ini tidak memberikan pendapatan yang stabil dan sangat bergantung pada musim serta ketersediaan proyek, sehingga rentan menimbulkan pengangguran secara berkala. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga membatasi kemampuan individu untuk mengakses peluang kerja di luar desa. Sebagian besar pekerjaan formal di kota maupun sektor industri mensyaratkan minimal lulusan SMA/SMK, sehingga masyarakat dengan pendidikan rendah sulit bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Meskipun mayoritas responden menganggap pendidikan rendah sebagai faktor utama, proporsi 25% yang tidak setuju menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan bukan satu-satunya penyebab pengangguran desa. Dalam banyak kasus, individu dengan pendidikan menengah bahkan tinggi tetap mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja di desa.

Temuan ini sejalan dengan Nurhaila & Anwar (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran di desa juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti minimnya sektor industri, rendahnya investasi, serta kurangnya diversifikasi ekonomi. Dengan kata lain, pengangguran tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas individu, tetapi juga oleh ketidaksiapan struktur ekonomi desa dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pengangguran di desa merupakan hasil interaksi antara faktor individual (pendidikan dan keterampilan) dan faktor struktural (ketersediaan lapangan kerja). Tanpa transformasi ekonomi desa yang mampu menciptakan pekerjaan produktif, peningkatan pendidikan saja tidak

akan cukup untuk menekan angka pengangguran. Temuan ini menegaskan bahwa penanggulangan pengangguran di desa harus dilakukan secara terpadu, melalui: Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, Pengembangan sektor ekonomi desa yang lebih beragam, dan Penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat berkembang menjadi ruang produktif yang mampu menampung dan memberdayakan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

**Diagram 3.5 Desa Belum Memiliki Banyak Usaha yang Membuka Lowongan Pekerjaan**



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah mengidentifikasi faktor individual seperti pendidikan, bagian ini membahas faktor struktural yang berasal dari kondisi ekonomi desa, khususnya terbatasnya jumlah usaha produktif yang mampu membuka lapangan kerja. Dalam perspektif pembangunan wilayah, keberadaan unit usaha lokal berperan sebagai penggerak utama penciptaan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Ketika struktur ekonomi desa masih lemah dan didominasi oleh sektor tradisional, maka kemampuan desa untuk menyerap tenaga kerja juga menjadi sangat terbatas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa minimnya usaha lokal merupakan salah satu penyebab utama tingginya pengangguran di wilayah perdesaan. Nurhaila & Anwar (2024) menyatakan bahwa rendahnya jumlah unit usaha di desa berpengaruh signifikan

terhadap terbatasnya serapan tenaga kerja. Wijaya et al (2020) juga menemukan bahwa desa dengan sektor usaha yang kurang berkembang cenderung memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang lebih tinggi. Sementara itu, Kementerian Desa PDTT (2022) menegaskan bahwa lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pengangguran di desa tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kualitas tenaga kerja, tetapi juga oleh belum berkembangnya struktur ekonomi lokal.

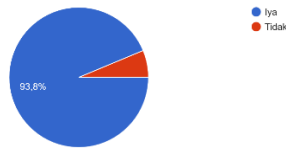
Berdasarkan hasil survei, pada pertanyaan kelima sebanyak 87,5% responden menjawab “iya” bahwa desa belum memiliki banyak usaha yang membuka lowongan pekerjaan, sedangkan 12,5% responden menjawab “tidak”. Hasil ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden memandang terbatasnya usaha produktif sebagai penyebab utama pengangguran di desa. Minimnya usaha lokal menunjukkan bahwa desa belum memiliki perkembangan sektor ekonomi yang cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja secara luas. Akibatnya, masyarakat hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan, sehingga persaingan dalam memperoleh pekerjaan menjadi tinggi. Kurangnya usaha di desa juga dapat disebabkan oleh keterbatasan modal, minimnya akses terhadap pasar, serta lemahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat. Banyak desa yang memiliki potensi sumber daya alam, namun belum mampu mengelola potensi tersebut menjadi usaha produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini menyebabkan potensi desa tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rohmah et al (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi kewirausahaan menjadi penghambat utama berkembangnya UMKM di desa. Selain itu, keterbatasan usaha juga berkaitan dengan

belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi lokal, misalnya melalui pembentukan UMKM, koperasi desa, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketika BUMDes tidak berjalan efektif atau tidak memiliki program usaha yang jelas, maka desa kehilangan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Septiningsih et al (2024) menegaskan bahwa banyak BUMDes belum berfungsi optimal karena lemahnya manajemen dan kurangnya inovasi usaha.

Dampak langsung dari kondisi ini adalah meningkatnya kecenderungan masyarakat usia produktif untuk merantau ke kota. Migrasi ini biasanya terjadi karena desa tidak mampu menyediakan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Akibatnya, desa dapat mengalami kekurangan tenaga kerja produktif dalam jangka panjang, sehingga pembangunan desa menjadi semakin lambat. Fenomena ini sejalan dengan penelitian BPS (2023) yang menunjukkan bahwa desa dengan basis usaha lemah memiliki tingkat migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan desa dengan ekonomi yang lebih beragam. Hasil survei ini menegaskan bahwa persoalan pengangguran desa sangat dipengaruhi oleh lemahnya struktur ekonomi desa dan rendahnya jumlah usaha yang mampu membuka kesempatan kerja. Oleh karena itu, upaya penguatan ekonomi desa perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha lokal. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat diwujudkan melalui kemudahan perizinan, akses permodalan yang lebih luas, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas produksi. Lingkungan usaha yang mendukung akan mendorong tumbuhnya unit-unit usaha baru sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha yang telah ada.

Selain itu, peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pendidikan kewirausahaan berbasis potensi lokal perlu dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya kemampuan manajerial, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, usaha desa dapat berkembang secara lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha lokal juga memegang peranan strategis. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu menyusun program yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. Sinergi ini dapat memperkuat rantai produksi dan pemasaran, sehingga produk desa memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, UMKM, BUMDes, dan koperasi dapat difungsikan sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi peran UMKM, BUMDes, dan koperasi, desa dapat membangun basis ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan desa, tetapi juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Apabila transformasi ekonomi desa dapat berjalan secara konsisten dan terarah, maka pengangguran di desa dapat ditekan secara bertahap, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan perdesaan secara berkelanjutan.

**Diagram 3.6 Putus Sekolah Berkontribusi terhadap Meningkatnya Pengangguran**



Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Setelah mengidentifikasi berbagai faktor struktural seperti terbatasnya lapangan kerja, lemahnya sektor usaha desa, serta rendahnya kualitas pendidikan, bagian ini secara khusus menyoroti putus sekolah sebagai faktor individual yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran di wilayah perdesaan. Putus sekolah tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan seseorang untuk memasuki, bertahan, dan berkembang di pasar kerja. Ketika proses pendidikan terhenti di usia dini, individu kehilangan kesempatan untuk membangun keterampilan dasar, literasi, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa putus sekolah memiliki hubungan yang kuat dengan pengangguran, terutama di wilayah perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan SD ke bawah, baik di kota maupun desa. Penelitian Sari et al (2022) menunjukkan bahwa individu yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah memiliki risiko menganggur hampir dua kali lipat dibandingkan mereka yang menamatkan SMA/SMK. Temuan ini diperkuat oleh

Wahyuni & Maretasari (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya jenjang pendidikan akibat putus sekolah menjadi penghambat utama akses kerja formal di desa. Sementara itu, Sari et al (2022) menegaskan bahwa pendidikan berperan langsung terhadap mobilitas kerja dan daya saing tenaga kerja, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih terbatas.

Hasil survei menunjukkan bahwa 93,8% responden menjawab “iya” bahwa putus sekolah berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran di desa, sedangkan hanya 6,3% responden yang menjawab “tidak”. Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara luas menyadari bahwa putus sekolah merupakan salah satu akar permasalahan pengangguran. Persepsi ini sejalan dengan kondisi empiris di lapangan, di mana banyak individu usia produktif yang berhenti sekolah lebih awal akhirnya terjebak dalam pekerjaan tidak tetap atau bahkan menganggur dalam jangka panjang. Putus sekolah menyebabkan individu tidak memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Mereka umumnya hanya memiliki keterampilan dasar yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut kemampuan teknis, literasi digital, serta komunikasi. Akibatnya, mereka lebih banyak terserap di sektor informal seperti buruh tani, pekerja bangunan, atau pekerja serabutan yang bersifat tidak tetap dan berpenghasilan rendah. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap pengangguran musiman serta ketidakpastian ekonomi. Selain itu, individu yang putus sekolah juga cenderung kesulitan mengikuti pelatihan kerja formal karena keterbatasan latar belakang pendidikan dan rendahnya kepercayaan diri. Putus sekolah juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Banyak anak di desa terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu

orang tua bekerja atau karena keterbatasan biaya pendidikan.

Namun, keputusan ini justru menciptakan dampak jangka panjang yang lebih besar. Individu yang putus sekolah memiliki peluang kerja yang lebih sempit sehingga potensi pendapatannya rendah. Pendapatan yang rendah ini kemudian memperbesar risiko kemiskinan, yang pada akhirnya mendorong generasi berikutnya kembali mengalami putus sekolah. Kondisi ini membentuk siklus kemiskinan struktural yang sulit diputus. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al (2025) yang menyatakan bahwa putus sekolah di desa menjadi mekanisme utama reproduksi kemiskinan antar generasi. Dengan demikian, putus sekolah tidak hanya menjadi masalah pendidikan, tetapi juga persoalan ekonomi dan sosial yang berdampak langsung terhadap tingkat pengangguran desa. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran di desa harus diiringi dengan strategi menekan angka putus sekolah melalui: Peningkatan akses pendidikan menengah dan vokasi, Bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin, Penguatan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan berbasis desa, serta Pendampingan remaja putus sekolah agar dapat kembali ke jalur pendidikan atau dunia kerja. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, desa tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

### **Faktor yang Memengaruhi Tingginya Pengangguran di Desa**

Bagian terakhir dari analisis data kuesioner dan wawancara ini berfokus pada faktor-faktor utama yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran di wilayah pedesaan. Melalui persepsi responden, bagian ini berupaya memberikan gambaran

yang lebih menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan desa, tidak hanya dari sisi keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga dari aspek struktur ekonomi, peran pemerintah, serta kesiapan sumber daya manusia. Pendekatan ini penting karena pengangguran di desa tidak dapat dipahami sebagai masalah tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Setelah mengkaji berbagai faktor spesifik seperti rendahnya pendidikan, putus sekolah, serta terbatasnya jumlah usaha produktif di desa, bagian ini menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran di wilayah pedesaan. Pengangguran di desa tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu penyebab, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor struktural, ekonomi, sosial, dan individual. Dalam perspektif pembangunan wilayah, desa dengan struktur ekonomi sempit, bergantung pada sektor primer, serta minim diversifikasi usaha cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah (Todaro & Smith, 2020). Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan kerja dan dominasi sektor informal masih menjadi masalah utama di desa. BPS (2023) mencatat bahwa sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan tingkat keamanan kerja yang rendah. Sari et al (2022) menemukan bahwa ketergantungan pada sektor musiman menyebabkan fluktuasi pendapatan dan memperbesar risiko pengangguran terbuka. Sementara itu, Wijaya et al (2020) menegaskan bahwa lemahnya sektor industri dan UMKM di desa membuat tenaga kerja muda sulit memperoleh pekerjaan yang stabil.

Berdasarkan jawaban responden pada pertanyaan terakhir, tingginya tingkat pengangguran di wilayah pedesaan dipandang berkaitan erat dengan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Responden menilai bahwa kesempatan kerja yang

tersedia di daerah masih belum mampu menampung jumlah tenaga kerja usia produktif, terutama lulusan baru dari jenjang SMA/SMK. Akibatnya, banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan di daerah asal dan memilih mencari peluang kerja di wilayah lain yang dianggap memiliki kesempatan kerja lebih luas. Selain itu, responden menjelaskan bahwa struktur perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan pekerjaan informal yang bersifat tidak tetap. Ketergantungan pada sektor pertanian menyebabkan peluang kerja sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan panen. Pada periode tertentu masyarakat dapat memperoleh pekerjaan, namun ketika memasuki masa paceklik atau hasil panen menurun, sebagian tenaga kerja kehilangan sumber pendapatan sehingga meningkatkan risiko pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa belum berkembang secara merata dan masih minim sektor alternatif yang mampu menyediakan pekerjaan berkelanjutan. Sejalan dengan temuan ini, Rahmawati et al (2025) menyatakan bahwa desa dengan struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibanding desa yang memiliki sektor industri rumah tangga dan pariwisata lokal. Zuhaida (2025) juga menegaskan bahwa keberadaan sektor non-pertanian berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Beberapa responden juga menyoroti hambatan sosial dalam memperoleh pekerjaan, seperti praktik nepotisme atau kecenderungan peluang kerja hanya terbuka bagi kelompok tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan kerja tidak sepenuhnya dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Individu yang tidak memiliki relasi atau akses tertentu cenderung lebih sulit memperoleh pekerjaan meskipun memiliki kemampuan yang memadai. Fenomena ini sejalan dengan temuan Wulandari et al (2023) yang menyebutkan bahwa

jaringan sosial yang sempit menjadi penghambat utama mobilitas kerja di desa. Di sisi lain, responden menilai bahwa peran pemerintah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Kurangnya kebijakan yang fokus pada penguatan sektor produktif seperti UMKM, industri lokal, maupun pariwisata desa membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Bantuan sosial dinilai belum cukup efektif apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan produktif. Hal ini diperkuat oleh Hanim et al (2022) yang menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi desa lebih efektif menekan pengangguran dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.

Selain faktor struktural, responden juga menyebut adanya faktor individual, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Ditambah dengan adanya persyaratan kerja yang semakin tinggi, masyarakat menjadi lebih sulit bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Wahyuni & Maretasari (2022) menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja desa dan kebutuhan pasar kerja menjadi penyebab utama pengangguran struktural. Dengan demikian, hasil kuesioner menunjukkan bahwa penyebab pengangguran di pedesaan bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan, dominasi pekerjaan musiman, hambatan sosial, lemahnya peran pemerintah, hingga rendahnya kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran desa harus dilakukan secara terpadu, melalui perluasan kesempatan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar desa mampu menjadi ruang produktif yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dari kuesioner yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa persoalan pengangguran di wilayah pedesaan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling menonjol adalah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah, sehingga kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung jumlah tenaga kerja usia produktif secara optimal, terutama kelompok lulusan baru jenjang SMA/SMK. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar lulusan muda berada dalam situasi sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga banyak di antara mereka memilih merantau ke kota-kota besar atau bahkan bekerja ke luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Selain keterbatasan lapangan pekerjaan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian dan pekerjaan informal yang bersifat tidak tetap. Ketergantungan pada sektor pertanian menyebabkan peluang kerja sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan panen. Pada masa tertentu, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, namun ketika memasuki masa paceklik atau hasil panen menurun, kesempatan kerja menjadi semakin terbatas. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran musiman serta ketidakpastian pendapatan masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian desa belum berkembang secara merata dan masih minim sektor alternatif yang mampu menyediakan pekerjaan berkelanjutan sepanjang tahun.

Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka putus sekolah mempersempit akses masyarakat terhadap pekerjaan yang lebih layak, sekaligus membatasi kemampuan

mereka dalam bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Individu yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki keterampilan terbatas dan hanya mampu mengakses pekerjaan dengan pendapatan rendah atau pekerjaan yang bersifat sementara. Kondisi ini kemudian memperkuat pola pengangguran jangka panjang serta meningkatkan risiko kemiskinan struktural di pedesaan.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan sosial yang turut memperburuk situasi pengangguran. Beberapa responden menilai bahwa akses terhadap peluang kerja belum sepenuhnya merata, salah satunya karena adanya praktik nepotisme atau dominasi kelompok tertentu dalam proses rekrutmen. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan kerja tidak selalu didasarkan pada kemampuan atau kompetensi, melainkan pada kedekatan sosial, sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses relasi cenderung mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Di samping itu, faktor individu seperti rendahnya motivasi, kurangnya semangat dalam mencari pekerjaan, serta kecenderungan memilih-milih pekerjaan juga disebut sebagai faktor pendukung yang memperkuat tingginya angka pengangguran, terutama pada kelompok usia muda.

Berdasarkan simpulan tersebut, diperlukan langkah penanganan yang terarah dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat pembangunan ekonomi desa dengan menciptakan lapangan kerja produktif yang lebih luas, baik melalui pengembangan UMKM, penguatan sektor industri kecil, pengolahan hasil pertanian, maupun optimalisasi sektor pariwisata yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, diversifikasi ekonomi desa perlu didorong agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pertanian musiman, melainkan memiliki pilihan pekerjaan lain

yang lebih stabil. Dalam hal ini, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dioptimalkan agar mampu menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian utama melalui program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, serta penguatan literasi digital. Program pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat pedesaan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan tradisional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan putus sekolah melalui dukungan pendidikan, pemberian bantuan yang tepat sasaran, serta penguatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Lebih lanjut, transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa kesempatan kerja dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Sistem perekrutan yang terbuka dan berbasis kompetensi akan membantu mengurangi ketimpangan sosial serta menciptakan iklim kerja yang lebih sehat. Pada saat yang sama, masyarakat, khususnya generasi muda, juga perlu membangun sikap proaktif dengan meningkatkan keterampilan, memperluas informasi mengenai lowongan kerja, serta membangun kesiapan mental dan etos kerja yang kuat agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia. Dengan kombinasi strategi tersebut, diharapkan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan dapat ditekan secara bertahap melalui peningkatan kesempatan kerja serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Becker, G. Stanley. (1993). *Human Capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd edition). The University of Chicago Press, Ltd.
- Borjas, G. J., & Cassidy, H. (2021). The Fall and Rise of Immigrant Employment During the Covid-19 Pandemic. *Harvard University*.
- BPS. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2022). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452>
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2022). *Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)*.
- Mankiw, G. (2021). *Principles of Economics* (Ninth Edition). Cengage Learning.
- Nurhaila, N., & Anwar, K. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpk) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Di 10 Kabupaten Kota Di Aceh Dengan Kemiskinan Tertinggi Tahun 2020). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(2).
- Rahmawati, D. A., Pratomo, W., & Radia. (2025). Integrating Problem-Based Learning Model, Culturally Responsive

- Teaching Approach, and Mind Mapping Media to Enhance the Cognitive Learning Outcomes of Fourth-Grade Students at Klitren Public Elementary School, Yogyakarta. *ICoTPE Proceedings 2025*, 3(1).
- Rohmah, Lutfiati, K., Arisudhana, A., & Sudirman, B. A. P. (2021). Resilensi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Umkm Dan Strategi Bisnis Umkm. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1).
- Sari, N., Fadilla, F., & Aravik, H. (2022). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Babat Toman. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2).
- Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., Santoso, B., Rustamaji, M., & Aldyan, A. (2024). Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2397–2405. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4589>
- Setyowati, F. A., & Melati, I. S. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(3).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed). Pearson.
- Utami, D. D., & Udjiyanto, W. D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(7), 637–646. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1441>
- Wahab, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2).
- Wahyulianti, K., Septiani, E. D., Haryanti, Y., Setianingrum, R., & Farliana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Gender Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 10(1), 75–86. <https://doi.org/10.29407/jae.v10i1.25030>
- Wahyuni, P., & Maretasari, R. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Jasa CV. Citra Abadi Cargo Sidoarjo. *Improvement: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30651/imp.v2i1.12995>
- Wijaya, P. A., Suprihanto, J., & Riyono, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 117. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i1.24503>
- Wulandari, W., Munawaroh, S., & Setiawan, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial

Governance di Desa Lembang.  
*PERSPEKTIF*, 12(1), 345–353.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8661>

Zuhaida, A. R. (2025). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2014-2023*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.